



Memotivasi masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai

Andi Ima Kesuma¹, Abdul Rahman², Rifai³
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. Rural communities that have been touched by the momentum of democracy need to increase their awareness of the participation in the process of regional head elections through political socialization. Political socialization is considered important in the process of political life. The aim of this program was to find out how to motivate people to participate in political succession through regional elections in Sinjai Regency. The output of this program was to foster community awareness to participate in creating a peaceful and democratic local election. The method used was delivering presentation to the public about the importance of participation in realizing a peaceful and democratic election. It was found that the understanding of the community in realizing a peaceful and democratic election was still lack. The participants had a high level of enthusiasm in participating this socialization which was proved by asking various election-related questions.

Keywords: participation, pilkada, peaceful, democratic

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah berjalan berdasarkan visi, misi kreasi dan variasi masing-masing sehingga berwujud konfigurasi dalam menuju daerah otonom, keberagaman menunjukkan kreatifitas yang tumbuh dan berkembang berdasarkan versi masing-masing daerah dan atau mencari bentuk/wujud yang sesuai untuk standarisasi nasional dikemudian hari.

Otonomi daerah sepenuhnya diharapkan untuk memberdayakan masyarakat, dan masyarakat berdaya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam koridor NKRI yang bersatu utuh, berdaulat kokoh kuat secara teratur, tertib, rapi, asyik, menuju daerah otonom yang mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan menuju masyarakat sejahtera dan mensejahterakan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dibawah ridha Allah SWT.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, maka bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi dibutuhkan pula keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keikutsertaan mereka dalam pilkada.

Pilkada merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pilkada digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pilkada dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pilkada atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi (Doni Hendrik, 2010).

Dengan mengutip pendapat Hartina (2014), partisipasi politik pemilih adalah salah satu bentuk pemberian aspirasi masyarakat melalui pemilukada. Menurut Ibrahim (2005) "partisipasi politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam bentuk yang terorganisir dalam membuat keputusan politik, dengan keikutsertaannya yang bersifat sukarela atas kemauan sendiri, didasari oleh tanggungjawab terhadap tujuan sosial secara umum dan dalam koridor kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Masyarakat atau pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap, banyak masyarakat yang mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasinya melalui pemilukada ini dengan ikut memberikan suaranya pada pelaksanaan pemilukada tersebut. Namun ada juga sebagian masyarakat yang enggan berpartisipasi didalamnya karna berpikir tidak ada perubahan yang signifikan pada mereka jika ikut berpartisipasi ataupun tidak ikut berpartisipasi.

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Fenomena tersebut seperti halnya menguatkan pernyataan Anthony Giddens (1999) dalam bukunya *Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives*. "haruskah kita menerima



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-602-555-459-9**

lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang marak”. Tentunya potensi Golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik (Soebagio, 2008).

Ketika berbicara tentang partisipasi pemilih dalam Pilkada, salah satu fenomena yang selalu menghiasi pesta demokrasi ini adalah hadirnya Golongan Putih (Golput). Istilah Golput di Indonesia pertama kali muncul menjelang Pemilu tahun 1970-an. Istilah ini muncul dari golongan muda terutama mahasiswa yang bertekad memboikot Pemilu karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan Pemilu secara demokratis. Mereka menilai kebebasan (civil liberties) dalam Pemilu yang merupakan prasyarat bagi suatu Pemilu yang jujur dan adil tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menegaskan pandangan ini, mereka mengambil sikap untuk tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara (Miriam Budiardjo, 2008).

Fenomena Golput di era Reformasi mengalami perluasan makna meskipun tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Beberapa faktor yang menjadi penyebab Golput antara lain: pertama, faktor administratif regulatif yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi seorang pemilih seperti ketiadaan kartu pemilih atau tidak mendapat undangan. Kedua, halangan teknis fisik yang berhubungan dengan ruang dan waktu seperti harus bekerja pada saat pemilihan atau kondisi sakit yang menghalangi. Ketiga alasan informasi tentang calon pemimpin, waktu dan tempat pemilihan yang tidak sampai ke pemilih. Keempat, pandangan skeptis idealis yang menaruh harapan tinggi terhadap proses Pilkada. Harapan yang dimaksudkan di sini adalah harapan terhadap partai politik untuk melahirkan kader yang layak menjadi pemimpin dan juga harapan terhadap pemimpin yang telah dipilih untuk bekerja sesuai amanat rakyat. Ketika proses dan hasil pemilu ternyata masih jauh dari harapan, Golput menjadi pilihan rasional yang tidak terelakkan. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa di era kebebasan berpendapat saat ini, keputusan untuk tidak memilih juga merupakan suatu pilihan rasional. Alasan Golput yang berhubungan dengan administrasi, teknis fisik dan kekurangan informasi menjadi hal yang bisa diatasi oleh penyelenggara dengan antisipasi dini. Sementara itu sikap yang berpijak pada pandangan skeptis idealis masih menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan Pilkada sampai saat ini. Tidak mudah mengubah pandangan orang yang sudah telanjur apatis. Perlu peran maksimal dari partai politik dan para

pemimpin untuk memberikan pendidikan politik melalui perilaku baik dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Apakah Golput merupakan solusi tepat menghadapi berbagai macam ketimpangan dalam kehidupan berdemokrasi saat ini? Tentu saja tidak. Terbukti sejak masa Orde Baru sampai era Reformasi saat ini, sikap Golput tidak mampu mencegah hadirnya pemimpin-pemimpin busuk yang bekerja hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Golput sebagai ekspresi apatis terhadap hasil dan proses demokrasi, sesungguhnya belum mampu memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas kepemimpinan masa kini. Politik uang dan kecurangan-kecurangan dalam Pilkada masih terus saja terjadi.

Sementara itu, di satu sisi sikap Golput juga dipertanyakan karena orang-orang Golput sesungguhnya tidak mempunyai legitimasi kuat untuk melaksanakan fungsi kontrol. Bagaimana mungkin mengadakan evaluasi atau mengkritisi orang yang tidak dipilih? Sikap apatis terhadap proses Pilkada pada akhirnya semakin melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemimpin yang berkuasa.

Situasi dilematis ini juga terjadi karena memilih di Indonesia adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga angka partisipasi pemilih tetap menjadi suatu masalah. Sesungguhnya bukan tentang hak dan kewajiban yang menjadi persoalan, tetapi perhatian sesungguhnya adalah pembangunan kualitas demokrasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat banyak. Kualitas demokrasi yang baik dengan partisipasi maksimal menjadi cerminan kedaulatan rakyat yang semakin menguat. Bandul kekuasaan tidak lagi berada di tangan segelintir orang saja, tetapi menjadi domain masyarakat secara luas. Tidak ada pemimpin yang bisa melaksanakan harapan semua orang. Tetapi sebagai pemilih, perlu ada prioritas pilihan yang mampu menjadi jawaban kebutuhan masyarakat. Orientasi kepada kepentingan yang lebih luas menjadi pertimbangan utama. Tidak sekedar berdasarkan pemikiran rasional pribadi atau kelompok tertentu saja, tetapi dengan pertimbangan matang yang mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa sekat primordial tertentu.

Dinamika kehidupan berdemokrasi memberi ruang yang luas terhadap berbagai potensi situasi yang bisa saja terjadi. Pilkada sebagai wujud nyata kehidupan demokrasi juga menghadirkan ragam kejadian dan fenomena yang dapat disaksikan secara kasat mata. Mulai dari persaingan antara para kandidat yang hendak menjadi pemimpin, persaingan para pendukungnya, juga berbagai situasi yang tidak bisa diprediksi bakal terjadi di sana. Terlalu sering kita dicecar dengan berbagai informasi yang memprovokasi. Terlalu banyak pikiran kita dibanjiri oleh berbagai isu. Pilihan jadi terasa begitu sulit hari ini, bahkan untuk calon pemimpin yang telah



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-602-555-459-9**

membuktikan kinerjanya dan dapat disaksikan kiprahnya secara nyata. Informasi yang dikonsumsi dari berbagai sumber, termasuk dari media massa di sekitar kita bisa mengubah arah pemikiran dalam sekejap mata. Ketika masyarakat menuntut pemimpin atau calon pemimpinnya untuk bijak dan kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan multidimensi saat ini, hal yang sama juga diharapkan dari masyarakat untuk menjadi pemilih yang berkualitas. Kita tidak perlu lagi memperluas makna Golput menjadi Golongan Pencari Uang Tunai atau Golongan Penerima Uang Tunai.

Agar fenomena di atas tidak berjangkit pada masyarakat perdesaan, khususnya di Desa Duampanuae, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai program tridarma perguruan tinggi perlu untuk dilaksanakan.

II. METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan ini metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan ialah metode penyuluhan. Penyuluhan yang berasal dari kata dasar “suluh” atau obor, sekaligus sebagai terjemahan dari kata “voorlichting” dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi yang dalam ke-gelapan. Sehingga, penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan (beneficiaries), sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru-penerangnya.

Terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat “searah” melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi “timbal-balik” yang memusat (*convergence*) sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Hal ini penting, agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat “pemaksaan kehendak” (indoktrinasi, agitasi, dan lain-lain) melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat kliennya secara berkelanjutan.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam

cara, seperti: pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun social-ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman).

Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubahannya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru akan meluntur kembali, manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keunggulan “baru” yang diyakininya memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan/hadiah atau pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan/hadiah/pemaksaan tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta terdiri atas warga Desa Duampanuae, khususnya yang bermukim di Dusun Sereng. Dusun Sereng dipilih sebagai tempat mengadakan sosialisasi karena di dusun inilah merupakan pusat administratif Desa Duampanuae dan kegiatan kemasyarakatan umum misalnya kegiatan olahraga, kesenian, dan keagamaan. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini berjumlah 15 orang dan mereka tergolong pemilih pemula. Pemilih pemula dijadikan sasaran kegiatan karena pada umumnya mereka apatis dan kurang perhatian terhadap proses pemilihan Kepala Daerah, karena mereka beranggapan bahwa siapapun yang terpilih, tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Desa Duampanuae. Kalaupun ada yang menaruh perhatian terhadap proses pilkada, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa siapapun calon yang memberikan uang paling banyak, itulah yang mereka akan pilih. Mereka berpikiran bahwa inilah kesempatan yang hanya sekali datang dalam lima tahun untuk menikmati dan memanfaatkan finansial dari kalangan elite. Mereka beranggapan bahwa dana yang mereka keluarkan juga berasal dari rakyat yang mereka kumpulkan selama berkecimpung dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Sinjai.

Mendengar fenomena sebagaimana yang mereka utarakan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa pemilih pemula di Desa Duampanuae telah kehilangan kepercayaan terhadap kaum elite yang berkecimpung dalam perpolitikan di Kabupaten Sinjai. Atas dasar itu, maka tim berusaha meyakinkan mereka bahwa maju mundurnya suatu daerah tergantung pada warga masyarakatnya, termasuk generasi muda. Ketika masyarakat diam dan tak ingin berpartisipasi dalam



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-602-555-459-9**

proses pemilihan kepala daerah, maka disinilah kesempatan para politisi yang memiliki maksud jahat untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilkada merupakan ajang bagi masyarakat untuk melakukan proses pengadilan bagi penguasa petahana. Ajang untuk melakukan evaluasi terhadap petahana sekaligus ajang untuk mencari pemimpin baru yang memiliki visi dan misi untuk kemajuan daerah di masa yang akan datang. Ketika petahana dianggap tidak mampu untuk menjalankan amanah yang telah diberikan selama lima tahun, maka kesempatan bagi masyarakat untuk mencabut mandat itu, dan ketika petahana dianggap berhasil maka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pembelaan terhadapnya.

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ialah bagaimana cara yang dilakukan agar bisa memilih pemimpin yang baik, bagaimana penilaian tim tentang menerima uang dari calon, apakah mesti berbeda pilihan dengan tokoh masyarakat setempat. Pertanyaan-pertanyaan itu pun direspon oleh tim. Untuk mengukur kebaikan seseorang maka harus diperhatikan kehidupan keseharian mereka. Ketika kita sering melihat para calon telah aktif pada kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya jauh sebelum dia mencalonkan diri sebagai Bupati maka itu bisa menjadi pertimbangan. Ketika sang calon dalam pergaulannya tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial dan status ekonomi, maka dia merupakan orang baik.

Mengenai uang yang diberikan kepada masyarakat, maka calon tersebut harus dipertimbangkan. Jangan sampai uang Rp.100.000, masa depan daerah tergadai selama lima tahun. Semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh calon dalam proses pencalonannya, maka ketika mereka berkuasa, bukan kepentingan rakyat yang diutamakan, tetapi usaha untuk mengembalikan modal yang telah dipergunakan. Yang akan menikmati keberhasilannya sebagai bupati/kepala daerah adalah para donatur yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan proyek pengembangan dan pembangunan daerah yang berdana besar.

Mengenai perbedaan pilihan, tim menyampaikan kepada para peserta bahwa dalam konteks negara demokrasi dan asas pemilu yang menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka masyarakat diberi kebebasan untuk memilih tanpa boleh ada paksaan dari pihak manapun, baik oleh aparat pemerintahan maupun tokoh masyarakat. Akan tetapi, sebagai pemilih yang cerdas, segala informasi yang berkaitan dengan calon kepala daerah harus diterima secara terbuka, dan semaksimal mungkin dihindari konfrontasi atau perdebatan yang dapat menyulut emosi dan perasaan hingga berujung pada pertikaian fisik. Pemilu harus dimaknai sebagai pesta demokrasi, ajang bagi masyarakat untuk

menyalurkan aspirasi dalam memilih dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan dapat membawa kemajuan dalam hal pembangunan fisik dan sumber daya manusia di Kabupaten Sinjai, khususnya di Desa Duampanuae. Tim juga menyampaikan kepada peserta bahwa jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil, Aparat Pemerintah desa maupun tokoh masyarakat yang mencoba mengarahkan dan memaksakan kehendak disertai dengan intimidasi terhadap masyarakat untuk memilih pasangan tertentu, maka masyarakat harus berani melaporkan yang bersangkutan kepada panwas atau pihak yang berwajib, demi terciptanya iklim demokrasi yang kondusif di Desa Duampanuae.

IV. KESIMPULAN

Peserta sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Ditemukan fakta bahwa peserta masih minim mengenai tata cara dalam proses pemilihan kepala daerah, terutama dalam hal menentukan pilihan dan kasus-kasus *money politic*. Selain itu, sebagai pemilih pemula yang minim pengalaman serta adanya oknum-oknum tertentu yang terkadang melakukan upaya paksa dalam menentukan pilihan, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi mereka, sebab bagaimanapun ada prinsip yang mereka pegang teguh yaitu harus hormat terhadap orang tua atau tokoh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiharjo, Miriam. (ed). 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hartina, Andi. Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 Di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 5, No.3, 2014*.
- Hendrik, Doni. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi, Volume 9, No.2, 2010*.
- Heryanto, Gun Gun. 2011. *Dinamika Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Lasswell Visitama.
- Heryanto, Gun Gun dan Rumaru Shulhan. 2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gatara, Said dan Moh.Dzulkiyah Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Maliki, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soebagio, H. Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora, Vol.12.No.2, Desember 2008: 82-86*.
- Soekanto, Soerdjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.